

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan tersebut, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Penegakan hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum acara perdata.

Masalah pertanahan merupakan suatu masalah yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya. Penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya kasus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga kehidupan lainnya, agar supaya persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat. Permasalahan sengketa pertanahan ini menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di negara belum tertib maupun terarah. Dalam rangka mencari solusi atas berbagai masalah pertanahan harus dilakukan secara hati-hati. Kondisi sosial budaya dan hukum tanah pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, kehati-hatian ini perlu dicermati untuk menjaga agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manusia dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan. Manusia seringkali tidak dapat menghindar dari yang namanya konflik atau sengketa dengan orang lain. Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi, atau melanggar hak orang lain berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. Guna mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban orang tidak boleh bertindak semaunya saja, ataupun main hakim sendiri. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya sendiri secara damai, dapat meminta bantuan kepada hakim. Cara menyelesaikan melalui hakim diatur dalam hukum acara perdata.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang benar dan seharusnya agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan direalisasi kalau perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Peranan lembaga pengadilan dalam konteks sosialnya (Muhammad, 2013:7) yaitu:

Lembaga pengadilan tidak sekedar wadah bagi mereka pencari keadilan, dan tidak sekedar pula sebagai sarana mengoperasionalisasikan hukum dalam wujud yang nyata melainkan pula sebagai wadah atau ajang mimbar bebas bagi mereka yang berurusan dengan lembaga tersebut.

Penyelesaian suatu perkara di mana aspek damai dan kerukunan menjadi tujuan utamanya. Setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, maka pengadilan sesuai dengan tujuan utamanya ia tidak langsung memeriksa dan menetapkan aturan hukum, melainkan berupaya mengajak pihak-pihak untuk berdamai (Muhammad, 2013:7). Seandainya perdamaian diperdapat, maka oleh

hakim akan dibuatkan akta perdamaian dan perkara diputuskan. Putusan perdamaian yang diberikan oleh hakim langsung mempunyai hukum tetap dan tidak dapat dibanding.

Kalau hakim dalam usahanya gagal mendamaikan para pihak, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dan diakhiri dengan suatu keputusan atau vonis. Bagi para pihak yang membawa perkara ke pengadilan selalu mengatakan bahwa berhak atas objek dipersengketakan tersebut. Penggugat yang mengajukan gugatan selalu berusaha agar gugatannya diterima dengan mengemukakan alat-alat bukti yang menguatkan atas dalil-dalil tersebut. Begitupun sebaliknya, tergugat dalam menjawab berupaya agar gugatan penggugat ditolak.

Sebelum hakim menentukan atau mempertimbangkan tentang hukumnya terlebih dahulu harus mengetahui dengan jelas duduk perkara, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Pengadilan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentunya perlu didukung oleh hakim dan pegawai pengadilan yang baik serta tangguh. Apabila hakim dan pegawai pengadilan ini kurang baik maka amanat undang-undang untuk menegakkan hukum serta keadilan kurang tercapai, sehingga kinerjanya dipertanyakan oleh masyarakat. Tujuan utama lembaga pengadilan adalah “terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (Muhammad, 2013:5). Maka diperlukan kinerja pengadilan yang efektif memberikan keadilan pada masyarakat.

Belakangan ini hakim dinilai kurang adil dalam memutuskan perkara di pengadilan. Ketidakadilan atas putusan akhir dari hakim bisa terjadi karena

mereka memperjualbelikan hukum dan jabatan serta dimanfaatkan oleh mafia peradilan bersama para pengacara. Salah satunya terjadi pada perkara perdata di pengadilan kota Bandung, hakim sangat berpihak kepada penggugat (sangat tidak adil dengan sikap cara berkomunikasi dan tindakan hakim yang kasar) dan pengadilan tingkat pertama ini berindikasi kuat berjalannya permainan kotor mafia peradilan. Hal yang sama juga terjadi pada salah satu pengadilan di Makasar, yaitu keabsahan putusan hakim memutuskan perkara ahli waris pengganti kurang mendalami materi pokok gugatan tersebut. Seharusnya mampu menggali sejak kapan terjadi sengketa dan mengapa para ahli waris terdahulu belum berbagi harta warisan, hingga selesainya perkara pembagian harta warisan di pengadilan (Pulungan:2012). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penyusun skripsi dengan judul: “Studi Tentang Kinerja Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2011)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pengadilan Negeri Klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat kinerja Pengadilan Negeri Klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pelaksanaan Pengadilan Negeri Klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan.
2. Mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja Pengadilan Negeri Klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menghasilkan suatu penjelasan tentang penyelesaian kasus sengketa tanah warisan melalui pengadilan negeri.
- b. Menghasilkan suatu penjelasan tentang akibat hukum bagi kedua belah pihak.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun keperdataan dan acara perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi sistem dan struktur pengadilan guna meningkatkan kinerja lembaganya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan sebagai pengembangan hukum bagi studi hukum dalam masyarakat terutama dalam hal sengketa-sengketa tanah warisan.

E. Daftar Istilah

1. Kinerja

Kinerja merupakan “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi” (Anggarini dan Puranta, 2010:180).

2. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri adalah “pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain” (Kansil, 1985:246).

3. Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan “konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa objek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya” (Surojo, 2003:12).

4. Warisan

Warisan adalah “harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat” (Suparman, 2005:2).